

THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME GENERAL ALLOCATION FUNDS AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES IN THE DISTRICT SIMALUNGUN

Tasya Angelina .P. Situmorang¹; Boy Krisanto Simarmata²; Jhonni Sirait³; Imelda Rimenda Purba⁴

Faculty of Economic and Business Universitas Katolik Santo Thomas¹²³⁴

e-mail: ptasya887@gmail.com¹ imelda.rimenda.purba@gmail.com⁴

ABSTRAK

The objective of this study was to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), The aim of this research is to examine the influence of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) on Capital Expenditures in Simalungun Regency. This research was conducted in Simalungun Regency with the data source being secondary data using the census method, namely in the form of quarterly reports on the realization of the Simalungun Regency regional income and expenditure budget (APBD), data for 2013-2023 obtained by researchers from the Regional Financial and Revenue Management Agency. The t test results show that PAD ($0.025 < 0.05$) has a positive and significant effect on capital expenditure, DAU ($0.014 < 0.05$) which partially has a positive and significant effect on capital expenditure, and DAK ($0.002 < 0.05$) which partially partial positive and significant effect on capital expenditure. The results of the f test show that PAD, DAU and DAK ($0.000 < 0.05$) simultaneously have a positive and significant effect on capital expenditure. Suggestions for the Simalungun Regency government are to pay more attention to regional finances as a step to optimize regional service improvements. And the regional government should further explore the potential that exists in the area to increase original regional income and make maximum use of transfer income from the central government so that it can increase the capital expenditure allocation in the Simalungun Regency APBD.

Keywords: Original Regional Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simalungun dengan sumber data adalah data sekunder dengan metode sensus, yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Simalungun pertriwulan data tahun 2013-2023 yang diperoleh peneliti dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Hasil uji t menunjukkan PAD ($0,025 < 0,05$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAU ($0,014 < 0,05$) dimana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan DAK ($0,002 < 0,05$) dimana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil uji f menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK ($0,000 < 0,05$) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Saran bagi pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan agar lebih memperhatikan keuangan daerahnya sebagai langkah pengoptimalan peningkatan pelayanan daerah. Dan pemerintah daerah agar lebih menggali potensi yang ada di daerah tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah dan lebih memanfaatkan secara maksimal pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD Kabupaten Simalungun.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

PENDAHULUAN

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi PEMDA dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan semua penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Laju PAD, DAU, dan DAK di Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan pengaruhnya terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah masih belum mencapai target dari anggaran yang dianggarkan dari tahun 2013-2023. Pemerintah Kabupaten Simalungun masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah termasuk belanja modal. Hal ini terbukti dari DAU di kabupaten Simalungun mengalami kenaikan, namun tidak diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal.

TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORITIS

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini berkaitan dengan kesimpulan peneliti yang menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah" (Mardiasmo, 2002: 132)

Selanjutnya, berdasarkan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah atau disingkat sebagai PAD merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yakni

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah}$$

2. **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum atau sering disebut dengan DAU merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang formula perhitungannya ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

3. **Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Jadi, tidak semua daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ndede, Sondakh, & Pontoh (2016) dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain

4. Belanja Modal

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak terwujud.

Darise (2008: 141) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengenai Laporan Realisasi APBD di Kabupaten Simalungun yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2013-2023.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji statistik f dan uji statistik t untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Simalungun.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	44	8817896447	252663015527	85123789749.06	56437457830.438
DAU	44	244452144000	1239639944134	768903861847.14	310880861744.284
DAK	44	0	177811807443	47985843230.75	44088006427.449
Belanja_Modal	44	19000000	456870119007	120655489602.39	116723296520.171
Valid N (listwise)	44				

Sumber: SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 1. diatas hasil perhitungan di atas dengan jumlah 44 sampel dapat dijelaskan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 8817896447 atau sama dengan Rp. 8.817.896.447,- nilai maximum sebesar 252663015527 atau sama dengan Rp. 252.663.015.527,- dan mean (rata-rata) sebesar 85123789749.06 atau sama dengan Rp. 85.123.789.749,06,- dan standar deviasi sebesar 56437457830.438 atau sama dengan Rp. 56.437.457.830,438,-
2. Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel DAU memiliki nilai minimum sebesar 244452144000 atau sama dengan Rp. 244.452.144.000,- nilai maximum sebesar 1239639944134 atau sama dengan Rp. 1.239.639.944.134,- dan mean (rata-rata) sebesar 768903861847.14 atau sama dengan Rp. 768.903.861.847,14,- dan standar deviasi sebesar 310880861744.284 atau sama dengan Rp. 310.880.861.744,284,-

3. Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel DAK memiliki nilai minimum sebesar 0 atau sama dengan Rp. 0,- nilai maximum sebesar 177811807443 atau sama dengan Rp. 177.811.807.443,- dan mean (rata-rata) sebesar 47985843230.75 atau sama dengan Rp. 47.985.843.230,75,- dan standar deviasi sebesar 44088006427.449 atau sama dengan Rp. 44.088.006.427,449,-
4. Belanja Modal. Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 19000000 atau sama dengan Rp. 19.000.000,- nilai maximum sebesar 456870119007 atau sama dengan Rp. 456.870.119.007,- dan mean (ratarata) sebesar 120655489602.39 atau sama dengan Rp. 120.655.489.602,39,- dan standar deviasi sebesar 116723296520.171 atau sama dengan Rp. 116.723.296.520,171.

**Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

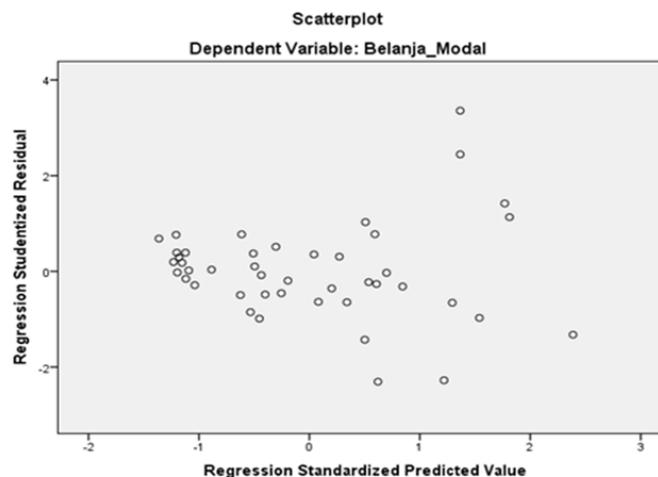
		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000264
	Std. Deviation	60739757330.5
		0892000
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.097
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.199 ^c

Sumber: SPSS, 2024

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	.213	4.700
DAU	.273	5.781
DAK	.297	3.365

Sumber:



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: SPSS, 2024

Hasil uji normalitas dari Tabel 2. menggunakan Kolmogorov-Smirnov dari pengelolaan SPSS, dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,199 lebih besar dari 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi ini memenuhi uji normalitas. Nilai *tolerance* pada Tabel 3. dari masing-masing variabel independen > 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel bebas atau independen. Dari nilai VIF juga terlihat bahwa masing-masing independen memiliki nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model regresi ini juga tidak terjadi multikolinearitas. Gambar 1. diatas mengindikasikan tidak ada pola tertentu seperti (bergelombang melebar kemudian menyempit) dan tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.854 ^a	.729	.709	62976320784.973	1.627

Pada Tabel 4. diatas, jumlah sampel penelitian (n) = 44 dan jumlah variabel independen =3 (k=3) maka diperoleh nilai dU= 1,6647 dan dL= 1,3749. berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS Versi 23 pada Tabel 4.4, nilai DW = 1,627.

Dengan demikian nilai dU<d<4-dU (1,6647<1,627<2,3353). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif (bebas uji autokorelasi) pada persamaan regresi penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	62034853 437.757	3228415 0920.089		1.92 2	.062		
	PAD	.858	.369	.415	2.32 6	.025	.213	4.700
	DAU	.911	.874	.497	2.99 9	.014	.273	5.781
	DAK	.996	.896	.589	3.25 0	.002	.297	3.365

Berdasarkan Tabel 5. di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 62034853437,757 + 0,858 X_1 + 0,911 X_2 + 0,996 X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 62.034.853.437,757 artinya:

- a. Nilai konstanta sebesar 62.034.853.437,757. Hasil ini dapat diartikan bahwa jika besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 62.034.853.437,757.

- b. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,858 maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 0,858 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 0,911 maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 0,911 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- d. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 0,996 maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 0,996 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	.729	.709	62976320784.973

Sumber: SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pada Tabel 6. diatas, maka diperoleh nilai $R = 0,854$ yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Simalungun. Kemudian untuk mengetahui pengaruh variasi variabel lain terhadap variabel terikat maka dapat dilihat dari koefisien determinasi, dimana diperoleh nilai koefisien determinasi atau *R square* yakni 0,729 berarti dapat dikatakan bahwa model regresi masih layak (fit) dalam memprediksi variabel terikat, dan sisanya sebesar 27,1% ($1 - 0,729$) ditentukan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

Tabel 7 Hasil Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	62034853437.757	32284150920.089		1.922	.062
	PAD	.858	.369	.415	2.326	.025
	DAU	.911	.874	.497	2.999	.014
	DAK	.996	.896	.589	3.250	.002

Sumber: SPSS, 2024

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal
Berdasarkan pada tabel di atas nilai t hitung = 2,326 untuk nilai t tabel, dimana *level of significance* (α) = 0,05 (5%) dan derajat kebebasan (df) = (n-k) atau (44-3), maka diperoleh t tabel sebesar 1,683. Maka nilai t hitung > t tabel ($2,326 > 1,683$) dengan nilai signifikan 0,025 dimana lebih kecil dari 0,05 artinya H1 diterima, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal
Berdasarkan tabel 4.11 di atas nilai t hitung = 2,999 untuk nilai t tabel *level of significance* (α) = 0,05 (5%) dan derajat kebebasan (df) = (n-k) atau (44-3), maka diperoleh t tabel sebesar 1,683. Maka nilai t hitung < t tabel ($2,999 < 1,683$), dengan nilai signifikan 0,014 dimana lebih kecil dari 0,05 artinya H2 diterima, bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Belanja Modal
Berdasarkan tabel 4.11 di atas nilai t hitung = 3,250 untuk nilai t tabel *level of significance* (α) = 0,05 (5%) dan derajat kebebasan (df) = (n-k) atau (44-3), maka diperoleh t tabel sebesar 1,683. Maka nilai t hitung < t tabel ($3,250 < 1,683$), dengan nilai signifikan 0,002 dimana lebih kecil dari 0,05 artinya H3 diterima, bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	427205422688	3	1424018075628555	35.905	.000 ^b
	566600000000		50000000		
Residual	158640679184	40	3966016979611802		
	472080000000		000000		
Total	585846101873	43			
	038700000000				

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial yang ditunjukkan pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa tingkat signifikan 0,025 dimana $0,025 < 0,05$ dan nilai t-hitung 2,326 dimana $2,326 > 1,683$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan, Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun periode 2013-2023.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian (H_1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun periode 2013-2023. Kondisi ini dapat dipahami karena tingkat kemandirian keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat berkaitan dengan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengakomodasikan terhadap kebutuhan masyarakat daerah setempat dalam pembangunan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah semaksimal mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemanfaatan potensi daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara pembelian dan perawatan infrastruktur. Contoh, untuk daerah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara membangun sarana prasarana agar wisatawan tertarik mengunjungi tempat pariwisata tersebut. Sehingga nanti pada akhirnya tempat pariwisata tersebut dapat memberikan pajak dan retribusi, yang merupakan pendapatan daerah. Dari pendapatan daerah tersebut, dapat dipergunakan untuk membiayai segala kewajiban dalam menjalankan pemerintahan, termasuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur lain. Dari penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayang Sari (2018) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang". Dari hasil penelitian tersebut pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Deli Serdang

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial yang ditunjukkan pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,014 dimana $0,014 < 0,05$ dan nilai t-hitung 2,999 dimana $2,999 > 1,683$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun periode 2013-2023.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian (H_2) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun periode 2013-2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima sudah dapat mendanai kebutuhan daerah otonomi. Dimana dana alokasi umum yang dikeluarkan oleh pemerintah karena

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simalungun terus ditingkatkan guna mendorong program pembangunan di setiap sektor ekonomi di Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Tingginya kontribusi DAU yang didapatkan oleh pemerintah daerah dapat dialokasikan untuk membiayai perbaikan jalan tersebut secara bertahap, karena Silondae (2016) menyatakan bahwa dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan dan akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah dalam jangka panjang. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika DAU yang diterima oleh pemerintah daerah meningkat maka alokasi anggaran untuk belanja modal juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Venny Tria Vanesha (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial yang ditunjukkan pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,002 dimana $0,002 < 0,05$ dan nilai t-hitung 3,250 dimana $3,250 > 1,683$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan, Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun periode 2013-2023.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian (H_3) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun periode 2013-2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus seperti kegiatan program pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, seperti : program pendidikan yakni perbaikan bangunan sekolah dan penambahan buku ajar yang didistribusikan kepada setiap sekolah, serta untuk program kesehatan yakni pembangunan Puskesmas dalam melayani masyarakat untuk berobat, maka akan berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rinawati (2020) dengan judul pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah di kabupaten Maros 2017-2019 hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial bahwa dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara simultan yang ditunjukkan pada tabel 4.12, menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar $35,905 > F\text{-tabel } 2,84$ dengan tingkat signifikansi $0,000 > 0,05$. Dengan demikian, tingkat signifikansi yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal, sehingga dapat dipahami bahwa variabel meliputi Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun periode 2013-2023.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah agar semakin memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Selain itu peningkatan pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rinawati (2020) dengan judul pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah di kabupaten Maros 2017-2019 hasil penelitiannya

menunjukkan secara simultan dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal

KESIMPULAN

Hasil analisis persamaan regresi maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Simalungun. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Hasil analisis persamaan regresi maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Simalungun. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Dari hasil analisis regresi maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kantor Pemerintah di Kabupaten Simalungun. Dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima. Dari hasil analisis regresi maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Simalungun. Sehingga hipotesis keempat yang diajukan dapat diterima. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai R Square sebesar 0,729 berarti dapat dikatakan bahwa model regresi masih layak (fit) dalam memprediksi variabel terikat, dan sisanya sebesar 27,1 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian regresi menyatakan bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah di Kabupaten Simalungun adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi pemerintah Kabupaten Simalungun, diharapkan agar lebih memperhatikan keuangan daerahnya sebagai langkah dalam pengoptimalan peningkatan pelayanan daerah. Dan pemerintah daerah agar lebih menggali potensi yang ada di daerah tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah dan lebih memanfaatkan secara maksimal pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD Kabupaten Simalungun. untuk membantu Belanja Modal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan sebaiknya memperbanyak variabel penelitian yang digunakan sebagai variabel bebas guna untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, E. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*, [online] 4(2), 1-11. Tersedia di : <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6528>
- Dewi, S,S. (2019). *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi keempat. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Halim Abdul. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim dan Damayanti. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STM YPKN.
- Huda, S. & Sumiati, A. (2020). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, [online] 6(3),
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah Nomor 145/PMK.07/2013, dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus

- Nugroho, Aris Adi, 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan*
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS)
- Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan
- Peraturan Presiden nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
- Permana, Deva Yoga. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- PP No. 24 Tahun 2005, Tentang Belanja Modal
- PP Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Belanja Modal
- Rachmawati A. Rifai (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017 Hlm 169-180 ISSN: 2302-2019.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi (MIXED METHODES)*. Penerbit Alfabet, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabet, Bandung.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Pemerintah Daerah (2015)
- Undang-undang Pemerintah Daerah, Penerbit : Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015
- Vanesha, T. V. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2011-2017. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, [online]14(1)27-36.<https://onlinejournal.unja.ac.id/paradigma/article/view/6609>